

BAB III  
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Terdapat berbagai permasalahan yang menjadi hambatan dalam mewujudkan pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang optimal. Pelayanan Sekretariat Daerah 2013 – 2018 berada pada lingkup tugas pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah. Lingkup tugas pelayanan Sekretariat Daerah dalam pelaksanaannya menghadapi beberapa permasalahan, seperti:

- 1). Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah sebagaimana diamanatkan pada PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,
- 2). Program Pemerintahan Umum yang digunakan pada renstra periode sebelumnya (2013-2018) dirasa belum mampu merepresentasikan tugas Sekretariat Daerah secara optimal,
- 3). Belum optimalnya input rekomendasi dalam rangka penyusunan kebijakan daerah oleh Biro-biro di lingkup Sekretariat Daerah kepada Sekretaris Daerah,
- 4). Belum optimalnya input informasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah secara komprehensif oleh Biro Lingkup Sekretariat Daerah kepada Sekretaris Daerah dan Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur),
- 5). Belum optimalnya pengoordinasian upaya pencapaian target pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah,
- 6). Kapasitas SDM belum cukup memadai untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah secara optimal,
- 7). Belum optimalnya pemenuhan sarana-prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah,
- 8). Belum optimalnya fungsi pembinaan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten/Kota, dan
- 9). Belum optimalnya koordinasi pembangunan antar sektor dalam menjawab permasalahan pembangunan daerah.

Berangkat dari berbagai permasalahan umum pelayanan Sekretariat Daerah di atas selanjutnya diperumuskan lingkup masalah pokok, masalah isu kebijakan, dan akar masalah yang selanjutnya disajikan dalam tabel 3.1. sebagai berikut:

Tabel 3.1.

## Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Penyusunan kebijakan belum dilakukan secara komprehensif dan berbasis data/bukti yang handal.	(1). Manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu didukung berbagai alternatif kebijakan yang inovatif. (2). Manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu didukung oleh agenda penataan peraturan perundang-undangan.	(1). Kebutuhan penyediaan dan tuntutan kualitas telaah berbagai alternatif kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin kompleks dan berkembang secara dinamis. (2). Sinergi penataan peraturan perundang-undangan guna mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2.	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas perangkat daerah belum optimal mendorong terwujudnya efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemeritahan daerah.	(1). Manajemen pengelolaan kebijakan strategis belum optimal sehingga perlu upaya peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan Daerah, (2). Manajemen secara integratif pelaksanaan tugas perangkat daerah belum optimal sehingga pelaksanaan tugas perangkat daerah belum efektif dan akuntabel. (3). Administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah belum optimal mendorong efektifitas koordinasi berbagai lingkup pemerintahan daerah. (4). Pelaksanaan otonomi daerah belum optimal mendorong efektifitas kerja sama berbagai lingkup pemerintahan daerah.	(1). Belum optimalnya manajemen pelaksanaan program/kegiatan strategis sehingga pencapaiannya cenderung belum efektif dan akuntabel. (2). Belum optimalnya manajemen pengendalian pencapaian kinerja perangkat daerah, (3). Koordinasi antar lingkup pemerintahan daerah belum optimal memfasilitasi kebutuhan bersama berbagai pihak, (4). Pelaksanaan otonomi daerah belum optimal mendorong inovasi penyelenggaraan pemerintahan secara relatif merata pada berbagai lingkup pemerintahan daerah.

### 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah Periode 2018 – 2023 mempunyai visi yaitu: Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari “Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”. Visi ini dijabarkan dalam empat misi, yaitu:

- 1). Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religious, toleran dan guyub untuk menjaga NKRI,
- 2). Mempercepat Reformasi Birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah Kabupaten/Kota,
- 3). Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran, dan
- 4). Menjadika rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Atas visi dan keempat misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka secara umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui tugas dan fungsinya berposisi mendukung pencapaian visi dan seluruh misi yang ada. Adapun secara khusus, peran utama Sekretariat Daerah yang eksistensinya berada dalam upaya meningkatkan efektifitas manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka secara khusus dapat juga diartikan mendukung pencapaian misi kedua, yaitu: mempercepat Reformasi Birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah Kabupaten/Kota.

Berikut disajikan tabel 3.2. yang merupakan deskripsi tugas dan fungsi Sekretariat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program Gubernur dan Wakil Gubernur. Tugas dan fungsi Sekretariat Daerah selanjutnya disandingkan dengan visi, misi, program gubernur dan wakil gubernur, kemudian di telaah faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah. Faktor-faktor ini yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan perangkat daerah.

Tabel 3.2.  
Telaah Visi, Misi, dan Program KDH

No	Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
	Visi : Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari "Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi"			
	Misi 02 : Mempercepat Reformasi Birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah Kabupaten/Kota	(1). Pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah;	(1). Manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu didukung berbagai alternatif kebijakan yang inovatif.	
				<b>Faktor Penghambat</b>
				1 Peran Biro Administrasi Pembangunan Daerah dalam memberikan rekomendasi penyusunan kebijakan bidang Perencanaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset belum optimal
				2 Peran Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dalam memberikan rekomendasi penyusunan kebijakan bidang Pemerintahan belum optimal
				3 Fungsi koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dalam dan luar negeri belum optimal
				4 Peran Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam dalam memberikan rekomendasi penyusunan kebijakan bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam belum optimal
				5 Peran Biro Kesejahteraan Rakyat dalam memberikan rekomendasi penyusunan kebijakan bidang Kesejahteraan

No	Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
				Rakyat belum optimal
				6 Peran Biro Perekonomian dalam memberikan rekomendasi penyusunan kebijakan bidang Perekonomian belum optimal
				<b>Faktor Pendorong</b>
				1 Kebutuhan perumusan kebijakan-kebijakan baru (inovasi) sesuai dengan konteks situasi yang dinamis
			(2). Manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu didukung oleh agenda penataan peraturan perundang-undangan.	
				<b>Faktor Penghambat</b>
				1 Sistem tatakerja penyusunan produk hukum dan Peningkatan kapasitas SDM bidang penyusunan produk hukum belum optimal
				<b>Faktor Pendorong</b>
		(2). Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;	(1). Manajemen secara integratif pelaksanaan tugas perangkat daerah belum optimal sehingga pelaksanaan tugas perangkat daerah belum efektif dan akuntabel.	
				<b>Faktor Penghambat</b>
				1 Fungsi evaluasi pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam belum optimal

No	Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
				2 Fungsi evaluasi pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang Umum belum optimal
				3 Fungsi evaluasi pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang kesejahteraan rakyat belum optimal
				4 Fungsi evaluasi pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang perekonomian belum optimal
				5 Pelaksanaan administrasi pemerintahan secara holistik dan terintegrasi dengan melibatkan berbagai sektor yang mendukung pencapaian sasaran belum optimal
				<b>Faktor Pendorong</b>
				1 Adanya Tugas dan Fungsi Sekda (Biro-biro) dalam pengoordinasian pelaksanaan fungsi seluruh perangkat daerah
				2. Urgensi pengendalian pencapaian kinerja sasaran OP dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah
		(3). Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;	(1). Manajemen pengelolaan kebijakan strategis belum optimal sehingga perlu upaya peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan Daerah,	
				<b>Faktor Penghambat</b>
				1 Integrasi pengendalian kinerja APBD dengan pencapaian indikator kegiatan dan indikator program perlu ditingkatkan
				2 Fungsi monitoring dan evaluasi pencapaian target pembangunan

No	Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
				dengan sumber dana bantuan keuangan perlu ditingkatkan
				3 Akuntabilitas pelaporan kinerja APBD dan bantuan keuangan melalui penyempurnaan sistem informasi pelaporan APBD dan bantuan keuangan perlu ditingkatkan
				4 Peran Biro Administrasi Pembangunan Daerah dalam pembinaan penyusunan LKPJ Kabupaten/Kota perlu ditingkatkan
				5 Sistem tatakerja pengkajian produk hukum kabupaten/kota dan Peningkatan kapasitas SDM bidang pengkajian produk hukum kabupaten/kota belum optimal
				6 Aksesibilitas produk hukum daerah melalui pengembangan sistem informasi JDIH perlu ditingkatkan
				7 Pemberian bantuan hukum dan penanganan sengketa hukum perlu ditingkatkan
				8 Pedampingan dan pembinaan implementasi kabupaten/kota peduli HAM belum optimal
				9 Fungsi monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan kewenangan belum optimal
				10 Pendampingan dan pembinaan dalam rangka penataan kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/kota belum optimal
				11 Pendampingan dalam rangka pelaksanaan ANJAB pada Perangkat Daerah Provinsi dan

No	Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
				Kabupaten/kota belum optimal
				12 Pembinaan dan evaluasi implementasi standar pelayanan publik perlu ditingkatkan
				13 Fungsi pembinaan dan evaluasi ketatalaksanaan perangkat daerah belum optimal
				14 Pembinaan implementasi Sistem AKIP dan ZI pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu ditingkatkan
				15 Fasilitasi, pembinaan, dan evaluasi 8 area perubahan Reformasi Birokrasi pada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota perlu ditingkatkan
				16 Koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bidang infrastruktur dan Sumber Daya Alam perlu ditingkatkan
				17 Koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bidang kesejahteraan rakyat perlu ditingkatkan
				18 Koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bidang Perekonomian perlu ditingkatkan
				19 Tata kerja pengkajian, perencanaan, dan pelaksanaan kebijakan pengadaan barang/jasa belum optimal
				20 Pengelolaan sistem pengadaan barang/jasa belum optimal
				21 Kapasitas SDM, pembinaan kelembagaan, dan advokasi pengadaan barang/jasa perlu



No	Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
				ditingkatkan
				<b>Faktor Pendorong</b>
				1 Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan perlu dibangun sampai pada aspek pencapaian, efisiensi, dan efektifitas program/kegiatan pembangunan.
		(4). Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Gubernur;	(1). Administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah belum optimal mendorong efektifitas koordinasi berbagai lingkup pemerintahan daerah.	
				<b>Faktor Penghambat</b>
				1 Fungsi pembinaan melalui pendampingan pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten/kota perlu ditingkatkan
				<b>Faktor Pendorong</b>
				1 Kebutuhan untuk melakukan sinergi dan integrasi berbagai pelaksanaan program/kegiatan untuk menghasilkan efek pembangunan yang luas dan merata.

### 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota

Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki hubungan dengan Renstra seluruh Perangkat Daerah Provinsi karena Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah selain sebagai pengoordinasi pelaksanaan fungsi seluruh perangkat daerah, secara umum Setda memiliki peran untuk mewujudkan efektifitas manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berikut gambaran hubungan relasional pelaksanaan tugas dan fungsi Sekda terkait dengan pencapaian renstra seluruh OPD berikut dengan permasalahan, kondisi yang menghambat, dan mendorong pelaksanaan Renstra Setda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023.

Tabel 3.3.  
Telaah Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi/ Kabupaten/Kota

No	Renstra PD Provinsi	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
1	Renstra seluruh Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah	(1). Pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah;	(1). Penyusunan kebijakan belum berdasarkan suatu telaah atas data/informasi yang kuat.	Faktor Penghambat: Ketersediaan data/informasi pendukung dan penguasaan analisis kebijakan Faktor Pendorong: Kebutuhan perumusan kebijakan-kebijakan baru (inovasi) sesuai dengan konteks situasi yang dinamis
		(2). Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;	(2). Koordinasi Pencapaian IKU seluruh OPD belum optimal	Faktor Penghambat: Kualitas indikator dan kapasitas OPD dalam mendorong pencapaian target tujuan/sasaran kinerja yang ditetapkan Faktor Pendorong: Adanya Tugas dan Fungsi Sekda (Biro-biro) dalam pengoordinasian pelaksanaan fungsi

No	Renstra PD Provinsi	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
				seluruh perangkat daerah
		(3). Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;	(3). Pengendalian atas pencapaian seluruh target pembangunan belum dilaksanakan secara optimal.	Faktor Penghambat: Kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan kebijakan dan kualitas tolak ukur keberhasilan kebijakan. Faktor Pendorong: Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan perlu dibangun sampai pada aspek pencapaian, efisiensi, dan efektifitas program/kegiatan pembangunan.
		(4). Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Gubernur.	(4). Koordinasi antar lingkup pemerintahan daerah belum optimal memfasilitasi kebutuhan bersama berbagai pihak	Faktor Penghambat: Sulitnya menyamakan konsepsi dan komitmen antar berbagai lingkup pemerintahan daerah. Faktor Pendorong: Kebutuhan untuk melakukan sinergi dan integrasi berbagai pelaksanaan program/kegiatan untuk menghasilkan efek pembangunan yang luas dan merata.

### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD

Tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah tidak terkait secara langsung dengan RTRW dan KLHS pada RPJMD.

TABEL 3.4  
Telaah RTRW dan KLHS pada RPJMD

No	Kebijakan RTRW/KLHS	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
I	<b>RTRW</b>			
	Pola ruang dan struktur ruang RTRW			
	Program Indikatif			
II	<b>KLHS</b>			
	Permasalahan dan Isu Strategis			
	Skenario dan Rekomendasi			

### 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah melaksanakan berbagai tugas dan fungsi guna mewujudkan efektifitas manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah antara lain sinergi penyusunan kebijakan daerah, efektifitas pelaksanaan kebijakan daerah, akuntabilitas pelaksanaan fungsi perangkat daerah, dan peningkatan manajemen umum di lingkup Sekretariat Daerah. Oleh karena itu terdapat isu-isu strategis yang perlu didorong dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Berikut isu-isu strategis pada lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, yaitu:

- 1). Perumusan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah secara utuh dan komprehensif mendasarkan Tugas dan fungsi Sekretariat Daerah sesuai dengan PP nomor 18 Tahun 2016,
- 2). Revitalisasi Peran Sekretariat Daerah dalam manajemen penyelenggaraan Pemerintah Daerah,
- 3). Perumusan pola hubungan kerja/sistem tata kerja pelaksanaan tugas dan gungsi sekretariat daerah
- 4). Peningkatan sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan dari level Kabupaten/kota hingga Pemerintah Pusat,
- 5). Peningkatan kapasitas SDM Biro lingkup Sekretariat Daerah utamanya terkait pemahaman tugas dan fungsi sekretariat daerah, dan
- 6). Peningkatan pemenuhan sarana-prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.